ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE CAMEL

(Studi Kasus PD BPR BKK Kabupaten Sukoharjo 2011)

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

SRI ANDAYANI

B 100 070 084

FAKULTAS EKONOMI

UIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2012

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN METODE CAMEL
(Studi Kasus PD BPR BKK Kabupaten Sukoharjo 2011)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

NAMA : SRI ANDAYANI

NIM : B 100 070 084

Yang dipertahankan didewan penguji pada tanggal dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Maret 2012

Pembimbing

(Drs. Suterto, MM)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. H. Triyono M.Si)

ABSTRAKSI

Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan permodalan seperti *capital adequacy ratio* (CAR) bagi bank atau biasa disebut rasio CAMEL sangat perlu dilakukan. Dengan dilakukannya analisis terhadap tingkat kesehatan keuangan bank, akan diketahui apakah telah terdapat suatu peningkatan atau bahkan sebaliknya di dalam kondisi keuangan perbankan. Media yang dapat dipakai untuk meneliti kondisi tingkat kesehatan bank PD BPR BKK Kabupaten Sukoharjo adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi laba. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada PD BPR BKK Sukoharjo berdasarkan tingkat kesehatan bank sesuai ukuran dari bank sentral yang meliputi rasio rentabilitas, solvabilitas, dan permodalan serta aspek manajemen bank yang disingkat CAMEL.

Metode penelitian yang digunakan adalah riset yaitu pengamatan terhadap data-data sekunder laporan keuangan tahunan PD BPR BKK Kabupaten Sukoharjo tahun 2011, yang terdiri dari neraca dan laporan rugi laba tahun 2009 hingga tahun 2011 dengan menggunakan analisis rasio yang meliputi tingkat kesehatan bank berdasarkan metode CAMEL.

Hasil penelitian menunjukkan Kinerja keuangan yang ditinjau berdasarkan rasio permodalan (CAR) dari tahun 2009 hingga tahun 20011, memiliki kemampuan yang cukup baik atau dalam kategori sehat. Kinerja keuangan yang ditinjau berdasarkan rasio aktiva produktif berdasarkan RAPB cukup sehat, namun berdasarkan *non permorming loan* (NPL) kurang sehat. Rentabilitas keuangan berdaasarkan *net profit margin* (NPM) dan *operating income ratio* dinyatakan cukup sehat. Rasio likuiditas berdasarkan cas ratio kurang sehat dan bank ratio (LDR) juga kurang sehat dengan demikian menurut metode CAMEL berdasarkan tambahan aspek manajemen (Menurut Risiko) PD BPR BKK Sukoharjo dalam keadaan kurang sehat.

Kata kunci: Rasio Keuangan, Tingkat Kesehatan Bank, CAMEL

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi yang terjadi selama empat tahun memberikan pelajaran yang sangat berharga, bahwa ternyata dasar ekonomi Indonesia tidak sekuat yang digambarkan sebelumnya. Penyebab dari terpuruknya ekonomi Indonesia adalah karena kesalahan perencanaan pembangunan.

Strategi pembangunan masa lalu membebankan pertumbuhan ekonomi pada industri skala besar (pengusaha besar), industri besar, industri tinggi. Dengan kata lain pembangunan lebih berorientasi pada konglomerasi. Industri skala besar yang mempunyai nilai tambah tinggi diharapkan dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi. Instrumen – instrumen pembangunan lebih banyak berpihak kepada industri skala besar. Di antaranya dengan kebijaksanaan pembatasan impor ataupun dalam kemudahan kredit.

Mencermati kenyataan tersebut sudah selayaknya apabila perhatian kita saat ini lebih tertuju kepada industri kecil yang sudah sekian lama terlupakan. Industri kecil merupakan bagian terbesar dalam industri di Indonesia, tengah menghadapi problematika baik internal maupun eksternal. Problematika tersebut harus dipecahkan agar industri kecil mampu menjadi penopang perekonomian nasional.

Problematika internal industri kecil di antaranya adalah rendahnya kualitas SDM, lemahnya permodalan, rendahnya penguasaan IPTEK, rendahnya penguasaan pasar serta tradisi sosial dan cara hidup yang kadang-kadang mengalahkan disiplin kerja perusahaan. Sedangkan problematika eksternal yang dihadapi industri kecil dan menengah di antaranya adalah strategi dan kebijaksanaan pemerintah yang lebih berorientasi konglomerasi, persaingan dengan industrialisasi skala besar/internasional, situasi politik nasional, krisis moneter dan globalisasi ekonomi yang bertumpu pada IPTEK. (Kuncoro, 2005).

Ada beberapa alasan mengapa perhatian kepada industri kecil dan rumah tangga (IKRT) perlu ditingkatkan, yaitu (Kuncoro, 2005)

1. Menyerap banyak tenaga kerja. Kecenderungan menyerap tenaga kerja umumnya membuat banyak IKRT juga intensif dalam menggunakan sumber daya lokal.

2. IKRT memegang peran penting dalam ekspor non migas yang pada tahun 1990 mencapai US $ 1.031 juta atau menempati ranking kedua setelah setelah ekspor aneka industri.
3. Adanya urgensi struktur ekonomi yang berbentuk piramida pada PJPT I menjadi semacam gunungan pada PJPT II. Pada saat itu diharapkan meningkatnya usaha kecil mejadi usaha skala menengah.

Pembinaan dan penanganan yang baik kepada industri kecil dan menengah akan memberikan manfaat ekonomi yang besar utamanya kepada rakyat kecil. Di beberapa tempat industri kecil mampu menjadi basis untuk memperkuat perekonomian masyarakat, umpamanya industri cor logam di Ceper Klaten atau industri mebel ukir di Jepara.

Dengan adanya perhatian yang lebih kepada pengusaha/ industri kecil, dalam beberapa bentuk usaha, seperti bantuan permodalan, pembinaan manajemen, pembinaan teknis dan sebagainya, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Studi yang dilakukan oleh Supriyono (1999), pada industri di Eks Karesidenan Surakarta, membuktikan bahwa bantuan permodalan bagi industri kecil berdampak positif pada peningkatan usaha. Walaupun belum berdampak pada peningkatan produktifitas.

Kekurangan modal merupakan masalah yang banyak dihadapi usaha kecil, sehingga penting untuk segera dipecahkan dalam rangka pengembangan usaha kecil khususnya dan perekonomian rakyat umumnya.Dengan dana yang terbatas dan sumber dana dari luar yang sulit diperoleh, membuat usaha kecil sulit mengembangkan usahanya. BPR BKK merupakan salah satu sumber modal bagi usaha kecil yang diharapkan mampu mengatasi masalah kekurangan modal. Pembentukan lembaga kredit formal ini berperan besar dalam mengembangkan usaha kecil. Persyaratan yang mudah, prosedur yang sederhana, pencairan dana yang cepat dan lokasi yang dekat dapat mengatasi permasalahan tambahan modal usaha kecil.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.279/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang pendirian dan usaha Bank Perkreditan Rakyat,

Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dengan surat ijin Menteri Keuangan No.: Kep/486/KM.13/1991 tanggal 8 Oktober 1991 Badan Kredit Kecamatan Sukoharjo yang berdiri sejak 28 November 1974 berubah statusnya menjadi Badan Perkreditan Rakyat (BPR) Sukoharjo BPR BKK Sukoharjo didirikan dengan tujuan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat desa yang pada umumnya masih terjerat pada ikatan rentenir. Modal awal sebesar Rp 1.000.000,00 diperoleh dari Anggaran Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Keberadaan PD. BPR BKK Sukoharjo benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat golongan lemah, sehingga secara bertahap kehidupan sejahtera dapat dicapai. Selain itu keberadaan BPR ini menghapus sistem ijon yang ada pada masyarakat setempat. Dorong dengan usaha yang keras dan ulet, serta menghapus sistem ijon dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat makin percaya dengan PD. BPR BKK Sukoharjo.

Sebagai lembaga keuangan, BPR BKK Sukoharjo dalam kegiatan operasinya dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tugas BPR antara lain:

1. Memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam rangka mengembangkan kesempatan berusaha di pedesaan.
2. Membantu menyediakan modal usaha bagi golongan ekonomi lemah di pedesaan.
3. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.
4. Menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Untuk mencapai tugas tersebut BPR BKK Sukoharjo menyelenggarakan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah.

3. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito, giro dan atau tabungan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah.
4. Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Kehadiran BPR BKK Sukoharjo di pedesaan dirasakan sangat penting artinya karena dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan penghasilan. Dengan permodalan dari BPR BKK, masyarakat ekonomi lemah khususnya nasabah BPR BKK akan dapat didorong muncul ke atas permukaan dan masuk dalam ruang lingkup jangkauan perbankan.

Rentabilitas merupakan satu tolok ukur dari tingkat kesehatan bank yang pada umumnya mempergunakan Lima variabel ukuran yaitu:

1. *Capital* (Permodalan),
2. *Asset Quality* (Kualitas Aktiva Produktif),
3. *Management*,
4. *Earning* (Rentabilitas), dan
5. Likuiditas.

Earning atau rentabilitas adalah kemampuan bank dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan laba dan hal ini berkaitan dengan tujuan jangka panjang bank yang juga mencari keuntungan dalam usahanya. Keuntungan bank yang besar sangat diharapkan oleh berbagai pihak untuk kepentingan tertentu. Pihak-pihak yang mengharapkan laba atau keuntungan bank tinggi antara lain.

Pemilik bank (*owner*) sangat mengharapkan rentabilitas tinggi untuk menambah modal.

Unsur karyawan juga mengharapkan rentabilitas tinggi karena apabila laba tinggi maka gaji yang akan mereka juga tinggi.

Pemerintah mengharapkan rentabilitas tinggi karena mengharapkan pajak perusahaan yang harus disetor kepada pemerintah juga tinggi.

Jadi dengan demikian faktor rentabilitas (kesehatan bank) mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bank, tetapi dilain pihak faktor likuiditas dan rentabilitas mempunyai kepentingan yang saling

bertentangan yaitu apabila suatu bank terlalu tinggi tingkat likuiditasnya atau terlalu tinggi didalam penyediaan dana untuk memenuhi kewajibannya maka peluang untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat semakin kecil dan hal ini dapat dipengaruhi terhadap kecilnya rentabilitas bank tersebut. Sebaliknya jika sumber-sumber dana yang ada pada bank hanya digunakan untuk memperluas penyaluran kredit maka likuiditas bank akan rendah dan hal ini dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan BPR BKK Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dengan asumsi CAMEL sebagai berikut:

1. Mengetahui tingkat permodalan BPR BKK Sukoharjo
2. Mengetahui risiko manajemen BPR BKK Sukoharjo
3. Mengetahui tingkat rentabilitas BPR BKK Sukoharjo
4. Mengetahui tingkat likuiditas BPR BKK Sukoharjo
5. Mengetahui tingkat kesehatan keuangan bank berdasar metode CAMEL

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bank

Beberapa pendapat tentang definisi bank yang dikutip oleh (Abdullah, 1999)

1. Prof.G.M. Verryn Stuart dalam bukunya Bank Politik
   Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa Uang Giral.
2. A.Abdurahman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan
   Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang.

3. UU Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok Perbankan
   Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
4. Sedangkan dalam pengertian nasional sesuai UU Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 tentang Perbankan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 7 th 1992 pasal 1)

1. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat (UU No.7 th 1992 pasal 13).
   a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simapanan berupa deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
   b. Memberikan kredit
   c. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
   d. Menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito dan atau tabungan bank lain.
2. Kegiatan-kegiatan usaha yang merupakan larangan bagi BPR (UU No. 7 th 1992 pasal 14).
3. Menerima simpanan berupa Giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
4. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
5. Melakukan penyertaan modal
6. Melakukan usaha perasuransian
7. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas.

   Agar dapat melaksanakan kegiatan usahanya dengan baik maka Undang-Undang No. 7/1992 mengatur wilayah pendirian Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut:

a. Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan di desa-desa di kecamatan di luar wilayah, ibukota negara, ibukota propinsi, ibukota kabupaten dan kotamadya.

Bank Perkreditan Rakyat dapat didirikan di ibukota kabupaten atau ibukota kotamadya sepanjang di ibukota kabupaten atau kotamadya tersebut belum terdapat BPR. Pendirian Bank Perkreditan semacam ini dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama koperasi atau Bank Umum milik negara atau Bank Umum milik Pemerintah Daerah.

Perkreditan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit (Tjoekam, 1999).

a. Waktu
b. Kepercayaan
c. Penyerahan
d. Resiko
e. Persetujuan/perjanjian

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir di proses akuntansi, yang meliputi (1) neraca, (2) perhitungan rugi-laba dan laba tahunan, (3) laporan perubahan posisi keuangan serta catatan atas laporan keuangan.

Melalui laporan keuangan, secara periodik dapat dilaporkan ifnormasi penting mengenai suatu perusahaan yang berupa :

a. Informasi mengenai sumber-sumber ekonomi dan kewajiban serta modal perusahaan.
b. Informasi mengenai perubahan-perubahan dalam sumber-sumber ekonomi netto atau kekayaan bersih (modal = sumber dikurangi kewajiban), yang timbul dari aktivitas usaha perusahaan dalam rangka memperoleh laba.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah :

1. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang mendasarkan pada catatan-catatan dan laporan keuangan yang dimiliki oleh PD. BPR BKK SUKOHARJO.
2. Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

Data yang digunakan penelitian ini adalah:

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi dengan mengumpulkan informasi dari PD. BPR BKK SUKOHARJO

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menilai tingkat kesehatan dan kinerja PD. BPR BKK Kabupaten Sukoharjo dengan menggunakan metode CAMEL sesuai Peraturan Bank Indonesia.

HASIL PENELITIAN

Dari hasil perhitungan *Capital Adequency Ratio* (CAR) PD. BPR BKK Sukoharjo. pada tabel 4.1 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2009 sebesar 24,42 % atau 0,2442. Untuk tahun 2010 terjadi penurunan sebesar 19,91 % atau 0,1991. Sedangkan untuk tahun 2011 terjadi kenaikan kembali sebesar 16,93 % atau 0,1693.

Berdasarkan hasil perhitungan Rasio Aktiva Produktif Bermasalah PD. BPR BKK Sukoharjo. pada tabel 4.2 di atas diketahui bahwa terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2009 sampai dengan akhir 2011. Pada tahun 2009 rasio menunjukkan angka sebesar 20,89 % atau 0,2089 dan untuk tahun 2010 angka rasio sebesar 12,04 % atau 0,1204 terjadi penurunan sebesar 8,85 % atau 0,885. Untuk tahun 2011 angka rasio menunjukkan nilai sebesar 6,12 % atau 0,612 terjadi penurunan sebesar 5,92 % atau 0,592.

Berdasarkan perhitungan *Non Performing Loan* (NPL) PD. BPR BKK Sukoharjo pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan yang signifikan dari tahun 2009 sampai dengan akhir 2011. Di tahun 2009, tingkat NPL menunjukkan angka sebesar 76,88 % atau 0,7688 dan untuk tahun 2010 NPL sebesar 42,99 % atau

0,4299 terjadi penurunan yang sangat drastis sebesar 33,89 % atau 0,3389. Dilanjutkan untuk tahun 2011 angka rasio NPL sebesar 16,65 % atau 0,1665 terjadi penurunan yang sangat drastis juga yaitu sebesar 26,34 % atau 0,2634.

Dari perhitungan *Net Profit Margin* pada tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa PD. BPR BKK Sukoharjo. Pada tahun 2009 sebesar 2,10 % atau 0,210. Untuk tahun 2010 turun sebesar 0,89 % atau 0,089 dan tahun 2011 turun 1,12 % atau 0,112. Dari kenaikan dan penurunan tersebut dapat diketahui bahwa *operating income* dari tahun ke tahun terus meningkat, tetapi dalam menghasilkan laba bersih tidak stabil atau turun naik tidak rata. Penurunan *net income* pada tahun 1998 disebabkan adanya krisis ekonomi.

Perhitungan *Operating Expense to Operating Income Ratio* PD. BPR BKK Sukoharjo. pada tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa terjadi penurunan antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 sebesar 14,23 % atau 0,1423 dan 1,46 % atau 0,0146. Kenaikan terjadi pada tahun 1998 sebesar 19,35 % atau 0,1935 dan pada tahun 2011 yaitu sebesar 4,48 % atau 0,0048 itupun bisa dikatakan bahwa rasio turun terus. Dari data diatas dapat diketahui bahwa *Operating Expense* dari tahun ke tahun naik turun tidak rata. Tetapi *Operating Income* berfluktuasi rata sehingga dapat dinilai dari segi rentabilitas untuk mendapatkan *net income* (laba bersih) optimal.

perhitungan *Cash Ratio* pada tabel 4.6 tersebut diatas menunjukkan bahwa, pada tahun 2009 naik 25,28 % atau 0,2528 dari 28,44 % atau 0,2844 menjadi 53,72 % atau 0,5372. Sementara itu untuk tahun 2010 dan 2011 terjadi penurunan yang drastis tiap tahunnya. Itu terlihat pada semakin besarnya selisih (turun) dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Penurunan yang drastis tersebut disebabkan makin menurunnya *cash assets* PD. BPR BKK Sukoharjo. dibandingkan dengan total kewajiban yang harus segera dibayar yang dimiliki PD. BPR BKK Sukoharjo. terus naik dari tahun ke tahun.

Pada perhitungan *Banking Ratio (Loans to Deposits Ratio)* tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2009 *bank ratio* sebesar 22,14 % atau 0,2214. Untuk tahun selanjutnya, tahun 2010 terjadi kenaikan drastis sebesar 60,88 % atau 0,6088. Tapi pada tahun 2011 penurunannya sangat drastis yaitu sebesar 63,65 %

atau 0,6365. Kenaikan pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 disebabkan penarikan kredit-kredit PD. BPR BKK Sukoharjo. kepada para debiturnya sangat besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan jumlahnya melebihi kewajiban yang dimilikinya. Tapi untuk tahun 2011 terjadi penurunan dalam jumlah penarikan kredit-kredit terhadap debiturnya sedangkan total kewajibannya naik.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tingkat permodalan berdasarkan rasio kapitalnya (CAR) BPR/BKK Sukoharjo dinyatakan sehat.
2. Kualitas aktiva produktif berdasarkan RAPB dinyatakan sehat, sedangkan berdasarkan non performing loan (NPL) dinyatakan kurang sehat.
3. Rentabilitas meliputi net profit margin (NPM) dinyatakan sehat, dan *operationg income ratio* dinyatakan sehat.
4. Likuiditas berdasarkan rasio kas (*cash ratio*) dinyatakan kurang sehat, sedangkan untuk *banking ratio* (LDR) dinyatakan kurang sehat.
5. Untuk manajemen bank secara keseluruhan berdasarkan tingkat permodalan, kualitas aktiva produktif, rentabilitas, dan likuiditas dari keempat rasio tersebut kualitas aktiva produktif dan likuiditas kurang sehat sehingga kesimpulan untuk manajemen bank maupun metode CAMEL peneliti dapat menyimpulkan bahwa kinerja keuangan BPR/BKK Sukoharjo dapat dinilai kurang sehat.

B. Saran

1. Bagi bank BPR/BKK Sukoharjo disarankan meningkatkan kinerja manajerialnya sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangannya.
2. Karena hasil penelitian ini tidak didukung data otentik secara keseluruhan, dan penilaian faktor manajemen berdasarkan renstra (rencana dan strategi) bank, penelitian ini masih kurang valid untuk penelitian dengan metode CAMEL agar dapat diperhitungkankan, sebaiknya menggunakan faktor

manajemen bank yang sesungguhnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan baik dokumentasi maupun kuesioner.

3. Secara umum hasil penelitian ini sudah dapat menggambarkan kinerja keuangan bank, namun sebaiknya pembaca juga mengambil referensi yang sejenis yaitu metode CAMEL dalam pengukuran kinerja keuangan bank.

DAFTAR PUSTAKA

Harnanto, 2004. *Analisa Laporan Keuangan*, Yogyakarta: UPD AMP, YKPN.

IAI., 1999. *Standar Akuntansi Keuangan*, Buku II, Salemba Empat, Jakarta.

Keown, Asrthur J., 2001. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.

Muljono, Teguh Pudjo, 2003. *Aplikasi Akuntansi Menjadi Dalam Praktek Perbankan*, BPFE, Yogyakarta..

Munawir, 2006, *Analisis Laporan Keuangan,* Edisi 8, Yogyakarta: Liberty.

Nasution, 2000. *Metode Research,* Bumi Aksara, Jakarta.

Riyanto, Bambang, Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan, Yayasan Gajah Mada,Yogyakarta, 2001.

Sawir, Agnes, 2006 *Analisis Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sartono, Agus, 2006. *Manajemen Keuangan*, BPFE, Yogyakarta.

Sinungan, Mochdar Syah, 1999, *Manajemen Dana Bank,* Bumi Aksara, Jakarta.

Susilo, 2000. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Salemba Empat, Jakarta.

Reksoprayitno,Soediyono. Prinsip-prinsip Manajemen Bank Umum Penerapannya di Indonesia. BPFE. Yogyakarta. 1992.

Bank Indonesia. 2004. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. (www.bi.go.id diakses tanggal 19 Oktober 2011)

Bank Indonesia. 2004. Surat Edaran Nomor 6/23/DPNP Perihal: Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. (www.bi.go.id diakses tanggal 19 Oktober 2011)

Bank Indonesia. 2001. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. (www.bi.go.id diakses tanggal 19 Oktober 2011)